

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi Sigap-RTLH maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses implementasi kebijakan Sigap-RTLH di Kabupaten Gresik jika ditinjau dari 6 variabel yang berpengaruh terhadap berjalannya suatu kebijakan sudah cukup baik. Dapat dilihat dari standar dan tujuan yang dibentuk untuk mengimplementasikan Sigap-RTLH telah berjalan sesuai dengan rencana. Hal ini didukung oleh tim implementasi Sigap-RTLH yang bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugasnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan akhir. Keberhasilannya juga didampingi dengan komunikasi antar SDM yang selalu dijaga untuk meminimalisir terjadinya kesalahan informasi. Pernyataan tersebut dapat dipertegas dari masyarakat penerima bantuan program perbaikan RTLH yang telah merasakan manfaatnya, terutama dari segi pelayanan yang semakin cepat. Meskipun demikian, PPD sempat melakukan kesalahan dalam menginput data RTLH. Hal ini terjadi karena PPD belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH. Keadaan tersebut menghambat proses sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data RTLH karena data yang terhimpun tidak akurat. Tentunya selain SDM, aspek anggaran juga berpengaruh dalam proses implementasi Sigap-RTLH. Pihak dinas memperoleh anggaran dari APBD dan APBN. Total anggaran yang didapatkan pada tahun 2021 sebesar Rp. 18.221.000.000,00. Kemudian, Rp. 13.329.525.000,00 pada tahun 2022. Meskipun begitu, anggaran tersebut belum mampu memenuhi target perbaikan RTLH yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik. Oleh karenanya, pihak dinas

langsung bekerja sama dengan CSR, yaitu *Habitat for Humanity Indonesia* untuk mencapai target. Setelah tertangani, anggaran diberikan kepada PPD masing-masing desa untuk digunakan sebagaimana mestinya. Adapun unit RTLH yang tertangani pada tahun 2021 adalah 799 dan 452 pada tahun 2022. Selama proses perbaikan RTLH, PPD benar-benar mengelola dan menggunakan anggaran dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban dari keluar dan masuknya anggaran yang dibuat dalam bentuk laporan. Laporan tersebut dicek kembali kebenarannya oleh sekretaris dinas sebelum diserahkan kepada DPRD Kabupaten Gresik. Adapun hasilnya adalah tidak terdapat penyelewengan anggaran dalam proses perbaikan RTLH.

2. Mengacu pada poin pertama bahwa proses implementasi Sigap-RTLH baik dari aspek anggaran dan sumber daya manusia sudah berjalan dengan cukup bagus. Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam keberjalanan Sigap-RTLH, seperti:
 - a. Kurangnya anggaran perbaikan RTLH yang disebabkan oleh terbatasnya pagu anggaran perbaikan RTLH dari sumber pendanaan APBD dan APBN.
 - b. Kesulitan melakukan verifikasi data di Sigap-RTLH yang disebabkan oleh kerusakan dari sistem itu sendiri.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, antara lain:

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik dapat menyediakan buku atau video panduan penggunaan fitur-fitur Sigap-RTLH yang mudah dipahami serta diakses dimanapun dan kapanpun. Ini menjadi solusi atas kesalahan menginput data yang dilakukan oleh PPD karena belum sepenuhnya memahami penggunaan fitur-fitur dalam Sigap-RTLH.

Dengan begitu, membantu menghemat dari segi anggaran, tenaga, dan waktu karena tidak perlu menyediakan program pelatihan secara *offline*.

2. Kurangnya anggaran perbaikan RTLH dapat ditangani dengan bekerja sama oleh beberapa CSR di Kabupaten Gresik. Mengingat Kabupaten Gresik merupakan kota industri, tentunya banyak perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Gresik seperti: PT. Semen Gresik, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pelindo III Cabang Gresik, dan sebagainya. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membantu proses perbaikan RTLH dalam segi anggaran.
3. Kesulitan Panitia Pelaksana Desa (PPD) dalam melakukan verifikasi data di Sigap-RTLH seharusnya dapat langsung ditangani. Pihak admin Sigap-RTLH dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik terkait *maintenance* sistem Sigap-RTLH versi android. Hal tersebut sesuai dengan tugas admin Sigap-RTLH yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tim Implementasi Sistem Informasi Program Pendataan Rumah Tidak Layak Huni pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari beberapa saran yang telah diberikan peneliti untuk memperbaiki hambatan dalam pelaksanaan Sigap-RTLH, peneliti sadar bahwa dalam penulisan ini masih mengalami keterbatasan, yaitu data anggaran yang disajikan hanya sampai bulan September tahun 2022. Hal ini dikarenakan penelitian tidak dilakukan hingga akhir tahun anggaran, tentunya masih terdapat kegiatan perbaikan RTLH yang berjalan sehingga data anggaran kemungkinan dapat berubah. Oleh karenanya, saran untuk peneliti selanjutnya adalah mencantumkan data anggaran hingga akhir tahun anggaran 2022. Selain itu, penulis juga berharap bahwa peneliti selanjutnya dapat menyampaikan apakah kesulitan PPD dalam proses verifikasi data telah ditangani. Mengingat sampai tulisan ini diselesaikan, kesulitan tersebut belum ditindaklanjuti oleh pihak dinas.